

LANGKAH CINTA PENUH DERITA ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

Anak Agung Ngurah Bagus Kesuma Yudha

Sekolah Tinggi Desain Bali

yudhoyo27@std-bali.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is known for its diversity of traditions, culture and ethnicity that is spread across various islands in the archipelago. In forming the character of Indonesian society to be what it is today, it cannot be denied by the role of several ancestors who came from various directions and settled in Indonesia. One of them is the ethnic Chinese (Tionghoa) who helped develop the way of culture to social life which is still adapted until this day. Also with the various dark stories that accompany, the journey of ethnic Chinese (Tionghoa) often becomes a scourge for themselves when faced with the momentum that corners their lives in the name of ethnicity in the archipelago.

Keywords: History, Chinese, Indonesia, Culture, Ethnicity

ABSTRAK

Indonesia dikenal akan keberagaman tradisi, budaya hingga etnisitasnya yang tersebar di berbagai pulau di bumi nusantara. Dalam pembentukan karakter masyarakat Indonesia hingga menjadi seperti saat ini, tidak dapat dipungkiri peran dari beberapa nenek moyang yang datang dari berbagai penjuru dan menetap di tanah air. Salah satunya etnis Tionghoa yang turut mengembangkan cara berkebudayaan hingga kehidupan sosial yang masih diadaptasi hingga hari ini. Tentu dengan berbagai kisah kelam yang mengiringi, perjalanan etnis Tionghoa kerap menjadi momok bagi diri mereka sendiri tatkala berhadapan dengan momentum yang menyudutkan kehidupan mereka atas nama etnisitas di Nusantara.

Kata Kunci : Sejarah, Tionghoa, Indonesia, Budaya, Etnis

PENDAHULUAN

Jalur Sutra Hingga Kolonial Belanda

Awal mula penduduk etnis Tionghoa datang ke nusantara terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Tepatnya ketika abad ke-4 saat seorang agamawan asal Tiongkok bernama Fa Hsien mendokumentasikan perjalanannya dalam bentuk tulisan. Tulisan ini sebenarnya adalah catatan perjalanannya tentang tempat – tempat sakral yang beliau temukan. Di catatan ini disebutkan pula pulau Jawa sebagai salah satu persinggahannya di tahun 414. Dalam perjalanannya, Fa Hsien disebutkan melewati gurun luas yang tak bersahabat dan dilanjutkan dengan pelayaran dengan cara menumpang kapal dagang saat akan menuju Srilanka dari Tamralipti (India). Di rute pelayarannya inilah Fa Hsien menyeberangi Samudra Hindia dan menuju ke arah Nusantara. Di sana Fa Hsien kemudian berlabuh di Jawa yang merupakan bagian dari nusantara (Legge, 1886).



Gambar 1. Lukisan Fa Hsien saat melakukan perjalanan
 Sumber: Idsejarah.net, 2019

Jalur perjalanan yang digunakan Fa Hsien dan kebanyakan penduduk Tionghoa saat itu hingga akhirnya mencapai Indonesia disebut sebagai jalur sutra. Jalur Sutra merupakan jalur perdagangan yang dirintis mulai dari Xian, ibu kota provinsi Shaanxi, China tengah sampai ke Rusia, Utara India, Afganistan, Persia dan berakhir di kota pelabuhan Tire di Libanon. Secara umum membawa komoditi kain khas cina yang kemudian menjadikan nama bagi jalur ini sendiri, sutra. Penduduk Tionghoa terkenal akan kegigihannya melakukan perjalanan perniagaan atau perdagangan. Ekspedisi dibidang perniagaan melalui jalan itu merupakan penanda hubungan pertama orang-orang Tiongkok dengan peradaban dunia. Jalan itu kemudian menjadi jalur utama dan pusat perdagangan orang-orang Tiongkok. Dalam hal ini kaum perintis jalur perniagaan tersebut tidak dapat mengandalkan siapa-siapa kecuali orang-orang mereka sendiri. Sejak saat itulah orang-orang Tionghoa mulai dikenal sebagai kaum perantauan yang tangguh dan paling banyak di dunia.

Dalam perjalanannya, penduduk Tionghoa banyak yang akhirnya menetap di daerahnya berdagang termasuk di Indonesia. Perkawinan campur dengan masyarakat asli Indonesia akhirnya menghasilkan etnis Indo-Cina. Walaupun Indo-Cina, keturunan ini tetap dikatakan sebagai etnis Tionghoa mengingat memiliki darah asli dari Tiongkok, Cina. Ini juga cara yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda dalam melakukan klasifikasi berdasarkan ras.

Hal ini secara langsung berperan dalam persoalan keterpisahan warga Tionghoa. Belanda membagi tipologi masyarakat di kawasan jajahan sebagai berikut: ras bangsa Eropa (pada umumnya orang Belanda), bangsa Asia Asing (pada umumnya orang Tionghoa) dan penduduk pribumi (orang Indonesia asli). Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila penduduk Indonesia memiliki kesadaran rasialis, dan konsep kebangsaan Indonesia berdasarkan pada ras (Suryadinata 1981:129–135).

Posisi penduduk Tionghoa pada jaman kolonial Belanda tergerus oleh peraturan yang dibuat para petinggi Belanda yang bercokol di Nusantara. Ini semata – mata adalah sebagai alat kontrol mengingat etnis Tionghoa merupakan masyarakat berkarakter tangguh dan secara politis serta ekonomi diperkirakan mampu menggeser kedudukan Belanda sebagai pemegang kekuasaan mayoritas saat itu.

Disebutkan dua konsep yang banyak digunakan dalam pembahasan kelompok etnis yakni “etnis mayoritas” dan “etnis minoritas”. Etnis mayoritas adalah kelompok budaya yang berperan dominan dalam mempengaruhi infrastruktur-infrastruktur dalam sebuah negara. Dengan kata lain, kelompok ini adalah pemegang kekuasaan sosial dan politik. Sementara itu, etnis minoritas mengacu pada kelompok etnis yang kekuasaan sosial dan politiknya kecil atau tidak ada sama sekali (Thomas dan Wareing 2007:136).

Sebagaimana yang disebutkan Thomas dan Wareing (2007:137), bahwa keyakinan-keyakinan yang dibentuk oleh etnis mayoritas dianggap sebagai sesuatu yang normal/wajar. Di lain sisi, segala sesuatu yang berbeda dari etnis

mayoritas akan dianggap atipikal/tidak wajar atau nyeleneh. Hal itupun tampak pada penggunaan bahasa etnis mayoritas dan minoritas. Etnis mayoritas sering menggunakan bahasa yang menekankan sifat “beda” dari etnis minoritas. Akan tetapi etnis minoritas pun dapat membedakan diri mereka dari etnis mayoritas dalam hal penggunaan bahasa (Thomas dan Wareing, 2007:152).

Lewat ke-mayoritasan-nya, pemerintah kolonial Belanda menerapkan peraturan penangkapan dan memenjarakan penduduk Tionghoa yang tidak memiliki izin tinggal di area Batavia. Selain itu kolonial Belanda mengeluarkan *Passenstelsel*. Ini berarti bahwa penduduk etnis Tionghoa memiliki keharusan untuk mempunyai surat jalan khusus (Pass) apabila hendak bepergian ke luar distrik tempat dia tinggal (Noorjanah, 2004:71).

Selain *passenstelsel*, VOC juga mengeluarkan peraturan *Wijkenstelsel*. Peraturan ini melarang orang Tionghoa untuk tinggal di tengah kota dan mengharuskan mereka membangun "gettho-gettho" yang berupa tempat tinggal pecinan. Hal ini tentu saja dilakukan agar pemerintah kolonial Belanda (VOC) mudah melakukan kontrol dan pengawasan terhadap warga Tionghoa. Selain karena potensi perekonomian dan politik yang dirasa mengancam kolonial Belanda, jumlah penduduk etnis Tionghoa terlihat meningkat pesat hingga tahun – tahun berikutnya. Sampai dalam *Volkstelling*, sensus Hindia-Belanda, di tahun 1930 mencatat terdapat 1.233.000 jiwa populasi penduduk etnis Tionghoa (Vasanty, 2004:359).

Perjalanan Panjang Demi Pengakuan

Jumlah penduduk Tionghoa diperkirakan mencapai 4 – 5 % dari jumlah penduduk Indonesia. Anggap saja ada 100 orang berkumpul, dapat diperkirakan 4 atau 5 orang didalamnya adalah penduduk Tionghoa. Sisanya dikategorikan sebagai etnis yang lain. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menggawangi berbagai kebudayaan, identitas dan sudah pasti etnisitas yang beragam.

Etnisitas adalah konsep kultural yang terpusat pada kesamaan norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktik kultural. Terbentuknya ‘suku bangsa’ bersandar pada penanda kultural yang dimiliki secara bersama yang telah berkembang dalam konteks historis, sosial dan politis tertentu dan yang mendorong rasa memiliki yang sekarang – kurangnya didasarkan pada nenek moyang mitologis yang sama (Barker, 2008:205).



Gambar 2. Foto keluarga etnis Tionghoa
Sumber: Galena.co.id, 2018

Yang terhitung hingga tahun 2010, jumlah kelompok etnis berjumlah sekitar 300 kelompok dan terbagi rata kedalam 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia (Sensus BPS tahun 2010). Jadi angka 4-5 % yang didaulat milik kelompok etnis Tionghoa terlihat cukup besar jika disandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 259.940.857 jiwa.

Sejak kedatangannya ke Nusantara, etnis Tionghoa telah memberikan kontribusi yang berarti. Budaya, arsitektur, seni sastra serta lainnya tumbuh dan berkembang lewat akulturasi budaya yang terjadi antara etnis Tionghoa dan penduduk asli Indonesia. Yang paling menonjol dari sektor perekonomiannya. Semenjak Jalur Sutra dikonsentrasikan sebagai jalur niaga, etnis Tionghoa diprediksi akan menuai sukses dalam perjalanannya di manapun mereka berdagang.

Pada awal sampai pertengahan abad ke-19, perdagangan eceran menjadi tumpuan utama bisnis etnis China Tionghoa. Sumatera memiliki jumlah terbanyak kalangan etnis China Tionghoa yang menjadi tengkulak, pedagang ikan, penjaja keliling kecil-kecilan atau pemilik penggilingan beras. Dari titik bawah ini mereka mulai membangun bisnisnya sembari aktif memperluas jaringan bisnisnya. Perlahan-lahan mereka sanggup bersaing dengan para pedagang serta usahawan kecil pribumi, tetapi tidak usahawan-usahawan Belanda.

Di saat yang sama, kolonial Belanda saat itu kalah bersaing dengan *EIC* (usaha dagang milik Inggris). Ini terjadi akibat perseteruan lanjutan antara Inggris dan kolonial Belanda yang mengakibatkan sepuluh orang dari Inggris disiksa dan dibunuh karena konspirasi melawan Belanda (Ricklefs, 1991:29). Selain karena *EIC*, kolonial Belanda menganggap etnis Tionghoa sebagai ancaman di masa depan. Kolonial Belanda berfikir jika mereka tidak melakukan sebuah manuver maka akan dipastikan kerugian akan menimpa. Hal itu semakin membuat kolonial Belanda kalang kabut dan mulai membuat aturan-aturan yang dianggap menguntungkan mereka guna menggajal lawan bisnisnya. Mulai dari melakukan pungutan-pungutan liar terhadap pedagang etnis Tionghoa sampai memberlakukan program "Surat Ijin Tinggal" bagi para pendatang. Aturan tersebut dibuat oleh kolonial Belanda pada masa Gubernur Jendral Adrian Valckenier (1737-1741).

Kolonial Belanda yang terlihat sengaja memojokkan posisi etnis Tionghoa kemudian memunculkan kemarahan kaum yang disubordinatkannya. Puncaknya terjadi pada 7 Oktober 1740, di mana lebih dari 500 warga Tionghoa dari berbagai penjuru berkumpul untuk melakukan penyerangan ke benteng Batavia setelah sebelumnya menghancurkan pos-pos penjagaan VOC di Jatinegara, Tangerang, dan Tanah Abang secara bersamaan. Di akhir konflik ini tercatat 7.500 jiwa etnis Tionghoa dibantai dalam perseteruannya dengan kolonial Belanda / VOC. Kejadian ini terkenal dengan sebutan Geger Pecinan (Dharmowijono, 2009:297).

Semua etnis Tionghoa (kemudian disebut 'orang asing Asia') 'disetarakan' (*gelijkgestelde*) dengan 'pribumi' (*Inlanders*) berdasarkan Peraturan Konstitusi (*Regeerings Reglement*) di tahun 1854. Posisi Belanda mengelompokkan etnis Tionghoa dengan tujuan yang diinginkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu kasus tersebut adalah Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang melarang penjualan atau pengalihan tetap atas tanah dari 'pribumi' kepada orang asing. Meskipun terdapat kelompok-kelompok serupa di Indonesia, jumlah etnis Tionghoa peranakan Jawa merupakan yang paling besar dan mereka dianggap orang asing (Coppel 1973).

Mimpi buruk etnis Tionghoa di Indonesia perlahan memudar tatkala terjadi pergerakan dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Sekian etnis Tionghoa yang dipelopori oleh beberapa tokoh juga memberikan sumbangsuhnya.

Berawal dari kebangkitan nasionalisme di Hindia Belanda yang tidak terlepas dari campur tangan yang terjadi dengan komunitas etnis Tionghoa. Tanggal 17 Maret 1900 terbentuk di Batavia, *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) atau Rumah Perkumpulan Tionghoa. THHK yaitu organisasi yang berkonsentrasi untuk mendorong orang keturunan Tionghoa agar mengenal identitasnya. Sekolah-sekolah juga di dirikan. Seperti di kota Garut yang dirintis sejak tahun 1907 oleh seorang pengusaha hasil bumi bernama *Lauw O Teng* beserta kedua anak lelakinya bernama *Lauw Tek Hay* dan *Lauw Tek Siang*. Kemudian terlihat dengan

peningkatan jumlah sekolah mencapai 54 buah sekolah pada tahun 1908 dan 450 buah sekolah pada tahun 1934. Inisiatif ini diikuti oleh etnis lain seperti etnis Arab yang mendirikan *Djamiat-ul Chair* meniru model THHK. Pada gilirannya hal ini menyadarkan priyayi Jawa tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda sehingga dibentuklah Boedi Utomo pada tahun 1908.

Boedi Utomo dalam pergerakan selanjutnya dan juga sejumlah motor penggerak pada tahun 1930-an seperti Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Amir Sjarifoeddin mendefinisikan bangsa secara politik dan secara eksplisit memasukkan etnik Tionghoa seperti Liem Koen Hian ke dalam konsep *Indonesier*. *Indonesier* merupakan istilah Belanda untuk orang Indonesia (Suryadinata 1981:129–135). Boedi Utomo yang merupakan gerakan pemuda pertama Indonesia menjadi dasar lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei di Indonesia.



Gambar 3. Koran SIN PO

Sumber: tirta.id, 2018

Semangat untuk mencapai kemerdekaan kembali berkobar lewat peran etnis Tionghoa. *Sin Po*, surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu yang terbit di Indonesia sejak Oktober 1910 mencetak syair lagu Indonesia Raya gubahan Wage Rudolf Supratman pada November 1928 setelah disepakati pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Koran *Sin Po* ini juga yang memelopori penggunaan kata 'Indonesia' untuk pertama kalinya menggantikan kata Hindia – Belanda. Dengan satu suara satu tujuan, Indonesia baik dalam berupa sebutan dan bahasa mulai digunakan sebagai pemersatu. Saat itu identitas yang dibangun bukan lagi hanya etnis Tionghoa. Identitas tersebut telah menjadi etnis Tionghoa-Indonesia. Warga etnis Tionghoa yang benar – benar telah melebur dengan status warga negara Indonesia.

Pergerakan kemerdekaan menjadi nyata saat 17 Agustus 1945. Euforia masyarakat, tidak terkecuali etnis Tionghoa, mengalir menyambut tanah air mereka telah sah merdeka atas nama Indonesia. Ir. Soekarno, dalam pidatonya tentang Kelahiran Pancasila pada tahun 1945, mendefinisikan masyarakat di bekas wilayah Hindia Belanda sebagai satu bangsa yang disatukan oleh faktor geopolitik dan keinginan mereka untuk kesatuan. Menurut perkataannya: 'Keseluruhan insan manusia, yang sesuai dengan geopolitik yang ditentukan Tuhan Yang Maha Esa, hidup dalam kesatuan seluruh kepulauan Indonesia dari ujung Utara Sumatra sampai Irian (Sukarno, 1961:12).

Soekarno baru memperjelas konsepnya tentang bangsa Indonesia pada bulan Maret 1963 ketika ia menyampaikan pidato di Kongres Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Dinyatakan secara terbuka bahwa peranakan Cina adalah suku Indonesia. Suku artinya kaki. Bangsa Indonesia memiliki banyak kaki, sama seperti lipan, yang memiliki kaki Jawa, kaki Sunda, kaki Sumatera, kaki Irian, kaki Dayak, kaki Bali, kaki Sumba, kaki peranakan Cina. Kaki peranakan adalah salah satu dari kaki-kaki kebangsaan Indonesia (Giok Tjhan 1963:14). Anakan Tionghoa mengacu pada orang Cina kelahiran setempat yang berbahasa Indonesia. Dengan perkataan lain, orang Cina totok yang lahir di Tiongkok dan berbahasa Cina tidak termasuk dalam bangsa Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan yang ditanggapi dengan antusias oleh kubu pendukung asimilasi, Soekarno berbicara tentang bhinneka sebagai 'das Sein' (yang ada) dan tunggal sebagai 'das Solen' (yang akan ada). Namun demikian, dalam pidatonya di hadapan Kongres Baperki pada bulan Maret tahun 1963 ia berbicara tentang peranakan Tionghoa sebagai salah satu dari banyak suku bangsa Indonesia. Dalam pidatonya pada perayaan hari kemerdekaan pada tahun 1964, ia mengatakan bahwa 'impiannya tentang sebuah bangsa ketika semua suku bangsa, termasuk peranakan dan keturunan asing dipersatukan, seharusnya diwujudkan baik dengan cara integrasi maupun asimilasi' (Coppel, 1976:59).

Rumusan ini dapat dibaca sebagai program asimilasi ketika semua orang Indonesia (termasuk etnis Cina) pada akhirnya bersatu padu menjadi kesatuan budaya Indonesia yang tunggal. Hal ini juga merupakan penegasan terhadap pidatonya di hadapan Baperki pada bulan Maret tahun 1963, bahwa suku bangsa peranakan Tionghoa hanya salah satu kaki dari badan Indonesia (Somers, 1965:272–273). Sampai di sini etnis Tionghoa sudah cukup untuk merasa aman dari segi pengakuan oleh negara.

Kemerdekaan Yang Terampas (Kembali)

Dua tahun setelah pernyataannya di hadapan Baperki, konflik kemudian terjadi di Nusantara. Tahun 1965 merupakan tahun kelam bagi Indonesia. Kondisi politik yang berkecamuk diantara perang ideologi mengakibatkan terjadinya peristiwa G30S/PKI. Gerakan 30 September (dahulu juga disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana tujuh perwira dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia.

Pada waktu terjadinya G 30S/PKI, etnis Tionghoa dituduh terlibat di dalam kejadian tersebut karena disinyalir keterlibatan Baperki dalam PKI. Banyak di antara mereka ditangkap militer, dibunuh massa, dan hilang atau melarikan diri ke luar Indonesia. Semua terjadi karena ideologi PKI yang berupa komunis dianggap ancaman hingga menempel keras bahkan bagi pengikut partai dan afiliasinya. Menurut Destutt de Tracy, ideologi merupakan ilmu yang didasari pada observasi dan bebas dari prasangka. De Tracy menganggap bahwa ideologi sebagai dasar bagi pendidikan dan ketertiban moral / moral order (Takwin, 2003:44). Bagi Soekarno, komunis merupakan ideologi yang tepat untuk mendapatkan ketertiban moral di Indonesia. Ini juga terlihat dari dibentuknya poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh sebagai bagian dari kekuatan komunis dunia.

Etnis Tionghoa yang notabene berasal dari Cina, juga mendapat pengaruh dari kejadian tersebut. Setelah Soekarno tergantikan oleh Soeharto pada tahun 1967 sebagai Presiden Republik Indonesia, Soeharto memberlakukan beberapa langkah yang mengubah kedudukan etnis Tionghoa di kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sebagai langkah lanjutan, Soeharto kemudian menerapkan kebijakan asimilasi kepada seluruh warga negara Indonesia utamanya kepada etnis Tionghoa. Soeharto sendiri menyatakan secara jelas bahwa warga negara Indonesia keturunan Cina harus segera berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat Indonesia asli (Dwipayana dan Hadimadja 1989:279).

Di masa ini dengan menggunakan nama asimilasi, Soeharto menghapus perlahan tiga pilar budaya Tionghoa, yaitu pers berbahasa Tionghoa, sekolah-sekolah menengah Tionghoa, dan organisasi-organisasi etnis Tionghoa. Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi untuk menggabungkan etnis Tionghoa dari kelompok nonpribumi ke dalam badan penduduk asli. Sehubungan dengan asimilasi, Donald Horowitz membedakan dua jenis asimilasi, yaitu: inkorporasi dan amalgamasi. Yang pertama berarti bahwa satu kelompok tertentu mengambil identitas kelompok yang lainnya, sedangkan yang kedua berarti dua kelompok

atau lebih yang digabung untuk membentuk sebuah kelompok yang baru, yang lebih besar (Glazer dan Moynihan 1975:115–116). Model yang diacu oleh Indonesia adalah model inkorporasi.

Ini kemudian berlanjut lewat keputusan Soeharto melalui Inpres No. 14/1967 yang substansinya mengarah pada pelarangan bentuk apapun yang berbau Cina, mulai dari huruf, simbol, kesenian (barongsai dan Hong) sekaligus perayaan Imlek. Semua itu dilarang diekspresikan dalam bentuk apapun di nusantara. Orde Baru yang disebut sebagai peralihan dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air.

Padahal menurut Mashall, konsep asli kewarganegaraan berarti hak yang sama dan tugas/kewajiban yang sama untuk semua warga negara tanpa memandang ras dan agama (Marshall 1950:28). Konsep ini berfungsi untuk mempersatukan warga negara. Meskipun demikian, di sejumlah besar negara Asia, khususnya di Asia Tenggara, warga negara mereka dibedakan menjadi warga negara pribumi dan nonpribumi, khususnya jika mengacu pada persoalan etnis Tionghoa dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan politik.

Ditambah lagi dengan penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih populer disebut SBKRI. Utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang "masih dipertanyakan".

Pada masa Orde Baru, pemerintah memberlakukan berbagai peraturan sebagai cara untuk mengontrol etnis Tionghoa di Indonesia. Peraturan – peraturan tersebut dapat dilihat sebagai diskriminasi hukum terhadap mereka karena dianggap asing dan diragukan kesetiiaannya terhadap negara dan bangsa Indonesia.

Soeharto dan penguasa Orde Baru lainnya telah menggunakan sejumlah etnis Tionghoa sebagai bankir dan pelaksana perusahaan-perusahaan mereka. Dalam posisi tersebut, etnis Tionghoa telah memperoleh berbagai keistimewaan dan fasilitas yang menyebabkan mereka terlihat secara mencolok ketika menjadi konglomerat bersamaan dengan posisi informal yang mereka dapatkan dalam pemerintahan.

Ini menyebabkan warga Indonesia menyimpulkan bahwa kategori etnis Tionghoa sebagai konglomerat. Kekayaan mereka yang berlimpah dianggap di dapatkan dari hasil kerjasama untuk korupsi dan manipulasi kekuasaan para penguasa.

Di sisi lain dari negatifnya pandangan warga terhadap etnis Tionghoa, di saat yang sama, rezim Soeharto juga menggunakan etnis Tionghoa sebagai kuda beban yang menarik kereta Orde Baru untuk mengejar tingkat kemakmuran sesuai dengan keyakinan pemerintah. Pusat Data Bisnis Indonesia antara tahun 1992-1996 mencatat 300 konglomerat yang mayoritas keturunan China Tionghoa menguasai penjualan Rp.227,2 triliun dengan aset Rp. 425 triliun.

Walau dengan catatan ekonomi yang spektakuler dari kalangan pebisnis etnis Tionghoa, pemerintah Orde Baru tetap melancarkan politik rasialnya dengan memasang rambu-rambu yang membuat pelaku bisnis etnis Tionghoa tidak dapat berbuat banyak. Kendali etnis Tionghoa terhadap kegiatan perekonomian bagaimanapun akhirnya memicu kecemburuan dan kebencian dari kalangan pribumi Indonesia. Kebencian dan kecemburuan ini meledak pada kerusuhan Mei 1998.

Mei 1998 merupakan puncak dari perampasan kemerdekaan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia

keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Bandung, dan Solo (Siegel, 1996).

Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang terbunuh, terluka, mengalami pelecehan seksual, penderitaan fisik dan batin serta banyak warga keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama besar yang dianggap provokator kerusuhan Mei 1998. (Purdey, 2006).

Harapan Baru Bagi Etnis Lama

Dua tahun setelah mimpi terburuk etnis Tionghoa di Indonesia terjadi, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) selaku presiden yang baru dilantik menggantikan B.J. Habibie, mengajukan konsep berbangsa bagi warga Indonesia yang telah dimodifikasi. Gus Dur mengatakan bahwa banyak orang Indonesia, seringkali menganggap etnis Tionghoa bukan orang Indonesia, dan mencatat bahwa ini adalah salah. Kesalahan tersebut berasal dari konsep pribumi, yang menganggap orang Tionghoa sebagai ras nonpribumi. Ia mengatakan lebih lanjut bahwa Indonesia terdiri bukan hanya dari dua ras, melainkan tiga, yaitu: ras Melayu, Austro-Melanesia dan Cina. Ketiga ras tersebut yang membentuk kebangsaan kita (Wahid 1998:7–8). Ia sendiri menyatakan dirinya berdarah sebagian Cina dan sebagian Arab, dan mengatakan bahwa tidak ada keturunan masyarakat asli (Wahid 1998:8).



Gambar 4. Gus Dur dan Masyarakat Tionghoa
Sumber: nu.or.id, 2019

Aksi nyata dari pernyataannya tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2000 yang isinya mencabut Inpres No. 14/1967. Kebijakan Gus Dur itu melahirkan kebebasan etnis Tionghoa dalam menjalankan ritual keagamaan, adat istiadat, serta membolehkan pengekspresian terhadap kebudayaannya di Indonesia. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa penduduk asli Indonesia masih menyimpan prasangka yang kuat terhadap etnis Tionghoa dan belum siap menganggap mereka sebagai orang sendiri. Ia (Gus Dur) mengkritisi penduduk asli Indonesia karena tidak adil dan tidak jujur terhadap orang Tionghoa dan mendesak mereka untuk mengubah sikap yang demikian (Jahja, 1991:224–228). Pada akhirnya ia mendesak penduduk asli Indonesia untuk menyatu dengan etnis Tionghoa.

Bagai gayung bersambut, harapan itu kemudian berlanjut pada pemerintahan selanjutnya yang dipegang oleh Megawati melalui pengesahan Imlek sebagai hari libur nasional lewat Keppres No. 19/2002. Imlek yang juga merupakan sebuah acara tahun baru bagi etnis Tionghoa dirayakan penuh sukacita pada tahun 2003. 10 bulan sejak disahkannya Keppres No. 19/2002 pada tanggal 9 April 2002. Konghucu yang akhirnya diakui sebagai salah satu agama nasional di Indonesia

juga seakan menghilangkan kegalauan etnis Tionghoa yang dahulunya terpaksa menggunakan nama agama lain saat orde baru masih menguasai.

Tiga pilar budaya Tionghoa perlahan bangkit kembali. Pers berbahasa Tionghoa, sekolah-sekolah menengah Tionghoa, dan organisasi-organisasi etnis Tionghoa kembali meramaikan keragaman bermasyarakat di Indonesia. Terlihat dari media massa dan elektronik yang mulai ramai menyiarkan siaran dan berita berbahasa mandarin.

Barongsai dan Liong sebagai ikon Imlek bagi etnis Tionghoa juga akhirnya terbangun dan mampu bereksistensi hingga menyentuh pedesaan terdalam. Semangat etnis Tionghoa kembali muncul dan memantapkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang sah. Bukan lagi dicap non-pribumi namun sebagai bagian dari orang Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Etnis Tionghoa akhirnya mendapat pengakuannya kembali sejak kedatangannya pertama kali lebih dari 1000 tahun yang lalu oleh Fa Hsien ke Nusantara. Tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik Indonesia yang muncul hari ini dibentuk oleh peran etnis Tionghoa yang meleburkan identitas dirinya dengan masyarakat pribumi. Namun etnisitas yang dimiliki justru membuat posisi warga Tionghoa kadang menjadi tidak menyenangkan bagi mereka. Permasalahan fisik dikedepankan tanpa melihat peran dan kontribusi yang memiliki lebih banyak pengaruh positif dalam perjalanannya. Pengklasifikasian pribumi dan non-pribumi menjadi awal mula jurang keterpisahan antara etnis Tionghoa dan pribumi. Ini juga yang berperan dalam membangun stereotipe bagi pribumi dalam menilai etnis Tionghoa sebagai bukan bagian dari masyarakat Nusantara. Sejak kedatangannya ke Nusantara, etnis Tionghoa hidup di tempat yang sama namun dengan penilaian yang terus berubah – ubah. Layaknya kedatangannya yang penuh cinta karena perannya membentuk karakter masyarakat dan sosial bagi negara Indonesia seperti saat ini namun memiliki sejarah derita yang panjang dalam prosesnya.

REFERENSI

- Barker, Chris, 2008, *'Cultural Studies : Teori dan Praktik'*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Coppel, C.A., 1976, *'Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia'*, dalam J.A.C.Mackie (peny.) *The Chinese in Indonesia: Five Essays'*, Melbourne: Nelson-The Australian Institute of International Affairs.
- Coppel, C.A., 1973, *'Mapping the Peranakan Chinese in Indonesia'*, *Papers on Far Eastern History*.
- Dharmowijono, W. W., 2009, *'Mengenai Kuli, Klontong, dan Kapitan: Citra Orang Tionghoa dalam Sastra Indonesia-Belanda 1880–1950 (Dokter Humanitas thesis)'*, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
- Dwipayana, G. dan R. K. Hadimadja, 1989, *'Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya'*, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Giok Tjhan, S, 1963, *'Baperki dalam Sejarah Indonesia'*, Jakarta: Hasta Mitra.
- Glazer, N. and D.P. Moynihan, 1963, *'Beyond the Melting Pot'*, Cambridge: MIT Press.
- Jahja, J, 1991, *'Nonpri di Mata Pribumi'*, Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- Legge, James, 1886, *'A Record of Buddhist Kingdoms: Being an account by the Chinese Monk Fa-Hien of his travels in India and Ceylon (A.D. 399-414) in search of the Buddhist Books of Discipline'*, Oxford, Clarendon Press. Reprint: New York, Paragon Book Reprint Corp.
- Marshall, T.H, 1950, *'Citizenship and Social Class and Other Essays'*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Noorjanah, Andjarwati, 2004, '*Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*', Semarang: Mesiass.
- Purdey, Jemma, 2006, '*Anti-Chinese violence in Indonesia, 1996-1999*', Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Siegel, James T, 1996, '*Solo in the New Order: Language and Hierarchy in an Indonesian City*', Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Somers, M.F, 1965, '*Peranakan Chinese Politics in Indonesia*', New York: Cornell University.
- Sukarno, 1961, '*The Birth of Pancasila' dalam Sukarno Toward Freedom and the Dignity of Man: A collection of Five Speeches by President Sukarno of the Republic of Indonesia*', Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- Suryadinata, L, 1981, '*Peranakan Chinese Politics in Java: 1917-1942*', Singapura: Singapore University Press.
- Takwin, Bagus, 2003, '*Akar - akar Ideologi*', Yogyakarta: Jalasutra.
- Thomas, Linda dan Shan Wareing, 2007, '*Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*', Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vasanty, Puspa, 2004, '*In Prof. Dr. Koentjaraningrat. "Kebudayaan Orang Tionghoa Di Indonesia", Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*', Penerbit Djambatan.
- Wahid, A, 1998, '*Prolog: PKB Didirikan oleh PBNU, dalam H.M. Munib (peny.) Pro-Kontra Partai Kebangkitan Bangsa*', Jakarta: Fatma Press.